

EVALUASI PENERAPAN SISTEM SIKLUS PENDAPATAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SMH MALANG

Ronny Hendra Hertanto, Yosar Haritzar

ronnyhendrahertanto@unigamalang.ac.id

yosarharitsar2017@unigamalang.ac.id

Prodi Akuntansi Universitas Gajayana Malang

Abstract

This study aims is to find out how the revenue cycle system is implemented at PT. Bank Perkreditan Rakyat SMH Malang. The research used here is case study research, where collecting, retrieving and analyzing data is carried out by making direct observations of the research object with the aim that the data obtained and complete information are in accordance with the problem at hand. The research time was taken in the period July-August 2024

The results of this research show that (a) The analysis of the organizational structure studied is known to have been carried out appropriately in accordance with the procedures and authority contained in the division of tasks of each implementer. This is proven by the existence of a separate credit department function from the accounting department; (b) the results of the analysis of the authorization and recording system carried out are in accordance with the authority and duties of each section; (c) analysis of the division of tasks and functional responsibilities and the system of authority and recording procedures that have been implemented are capable of ensuring sound practices in their implementation; (d) in carrying out operational activities, it is supported by employees who have high competence and are honest and responsible for their work so that all forms of systems and procedures related to the revenue cycle can be implemented well.

Keywords : rural banks, revenue cycle system

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem siklus pendapatan di PT. Bank Perkreditan Rakyat SMH Malang. Penelitian yang digunakan disini adalah penelitian studi kasus, dimana dalam pengumpulan, pengambilan dan menganalisis data dilaksanakan dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian dengan maksud agar data yang diperoleh dan keterangan yang lengkap sesuai dengan masalah yang dihadapi. Waktu penelitian diambil pada periode bulan Juli-Agustus 2024

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (a) Analisis struktur organisasi yang diteliti diketahui telah secara tepat dilakukan sesuai dengan prosedur dan wewenang yang terdapat dalam pembagian tugas masing-masing pelaksana. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fungsi bagian kredit terpisah dari bagian akuntansi; (b) hasil analisis sistem otorisasi dan pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing bagian; (c) analisis mengenai pembagian tugas dan tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang telah diterapkan mampu untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya; (d) dalam menjalankan aktivitas operasional didukung oleh karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi dan jujur serta bertanggungjawab atas pekerjaannya sehingga segala bentuk sistem dan prosedur terkait dengan siklus pendapatan dapat dilaksanakan dengan baik

Kata kunci : bank perkreditan rakyat, sistem siklus pendapatan

PENDAHULUAN

Suatu pengendalian intern yang baik, sebaiknya fungsi penjualan (operasi) harus terpisah dengan fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kecurangan maupun penyelewengan yang dilakukan karyawan yang nantinya dapat berakibat merugikan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang handal dapat terwujud apabila ada pemisahan tugas dan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang baik, adanya pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi serta adanya karyawan yang berkualitas. Widjajanto (2013).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui pengendalian intern dalam suatu perusahaan handal atau tidak adalah dengan melakukan analisis sistem pengendalian intern. Evaluasi dilakukan dengan mengecek bukti-bukti dan dokumen-dokumen seputar aktivitas pengendalian intern perusahaan dan menganalisis penerapannya, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan.

Usaha untuk mewujudkan tujuan perusahaan terkait dengan pengendalian intern maka diperlukan kerjasama dan komunikasi yang harmonis antara pimpinan dan karyawan, sehingga tercipta sebuah informasi akuntansi. Keberhasilan manajemen sangat tergantung dari sumber, keakuratan dan ketepatan waktu informasi yang dimiliki, dan informasi berperan penting dalam proses pengendalian dan pengambilan keputusan atas operasi perusahaan yang dilakukan, dengan informasi yang lengkap maka ketidakpastian terhadap tindakan yang akan diambil dapat dikurangi. Semua manajemen dalam suatu perusahaan dari suatu tingkatan yang terendah sampai tingkatan tertinggi memerlukan informasi yang beragam dan luas, yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Informasi pada suatu perusahaan dihasilkan melalui sistem informasi akuntansi yang memadai untuk menampung, menyeleksi, mengolah dan menyajikan informasi yang berguna sesuai dengan kondisi perusahaan dalam hal ini terkait dengan pendapatan perusahaan.

Disatu sisi, sektor usaha formal yang menjadi penggerak perekonomian dalam negeri, konsep syariah menjadi salah satu alternatif dalam perkembangan ekonomi kerakyatan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan penerapan sistem operasi bagi hasil adalah perbankan dan koperasi. Saat ini, oleh lembaga pembina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada diarahkan untuk berbadan hukum, mengingat BPR dapat berkembang dari kelompok swadaya masyarakat yang dikelola lebih profesional. Selain itu, dengan berbentuk BPR perluasan perkembangan ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil. Bentuk ini juga diharapkan dapat memenuhi tujuan memberdayakan masyarakat luas.

Salah satu usaha BPR syariah dalam memberdayakan masyarakat luas adalah dengan menghapus sistem bunga dan diganti dengan dengan sistem bagi hasil dalam usaha simpan pinjam, yang diselenggarakan koperasi karena untuk menghindarkan masyarakat kecil terjerat rentenir. PT. Bank Perkreditan Rakyat SHM (selanjutnya disingkat PT BPR SHM) Malang adalah badan usaha yang memakai sistem bagi hasil dalam melakukan usaha simpan pinjamnya. PT. BPR SHM Malang ini termasuk salah badan usaha jasa keuangan yang mengiduk pada BPR Syariah yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. PT. BPR SHM Malang dengan usaha simpan pinjam yang menggunakan sistem bagi hasil mempunyai misi membangun perekonomian masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya di kota Malang. Pola pembiayaan bagi hasil menggunakan dasar kesepakatan bersama antara pihak *shahibul mall* dan *mudharib*, membuat anggota yang meminjam tidak merasa dibebani oleh bunga karena dalam kesepakatan

anggota memilih sendiri besarnya angsuran porsi bagi hasil dan penentuan jangka waktu untuk pengembalian modal. Kepercayaan masyarakat kepada PT. BPR SHM Malang cukup baik, hal ini terlihat peningkatan jumlah anggota yang cukup banyak serta pendapatan BPR.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pula pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi, sehingga pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba maka tidak ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan. Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan sistem siklus pendapatan di BPR SMH Malang ?

Literature Review

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No.7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 3, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 4, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. (Ahmad, 2010)

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1998 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. (Burhanuddin, 2008)

Berdirinya BPR Syariah di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*Rate Interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga. (Warkum, 2004)

Status hukum BPR diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan.

Siklus pendapatan

Pengertian Pendapatan

Kebanyakan badan usaha menggantungkan diri kepada pendapatan untuk tetap bertahan hidup. Sebagian badan usaha yang berorientasi kepada pendapatan ini memperoleh pendapatan melalui penjualan produk dan melalui penyediaan jasa.

Pengertian pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.23 paragraf 06 (2004) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Siklus pendapatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dari aktivitas suatu aktivitas bisnis dan operasi proses informasi terkait yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk pelanggan dan menagih uang pembayaran untuk penjualan tersebut (Romney dan Steinbart : 2019)

Di dalam siklus pendapatan sebuah perusahaan, terdapat dua jenis penjualan yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai berarti pelanggan langsung membayar nilai barang yang dibeli saat barang diterima. Sedangkan transaksi penjualan kredit dilakukan melalui sistem penjualan kredit.

Belkaoui (2000) menafsirkan pendapatan sebagai:

1. Aliran masuk asset bersih yang disebabkan oleh penjualan barang atau jasa.
2. Aliran keluar barang atau jasa dari perusahaan kepada para pelanggannya.
3. Produk suatu perusahaan yang semata mata disebabkan oleh penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan selama satu periode waktu tertentu.

Menurut Badriwan (2002) merumuskan pengertian pendapatan adalah: "Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain asset suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha."

Tujuan Siklus Pendapatan

Menurut Wilkinson *et al.* (2000:416). Tujuan utama siklus pendapatan adalah sebagai sarana pertukaran produk atau jasa dengan kas konsumen. Sedangkan tujuan khusus yang ada dalam tujuan umum siklus pendapatan antara lain:

1. Mencatat pesanan penjualan secara tepat dan akurat.
2. Memverifikasi kelayakan konsumen untuk mendapatkan kredit.
3. Mengirimkan barang atau melakukan jasa sesuai dengan waktu yang telah di sepakati.
4. Menagih biaya untuk barang dan jasa secara tepat waktu dan akurat.
5. Mencatat dan mengelompokkan kas yang diterima secara tepat dan akurat.
6. Memposting penjualan dan penerimaan kas ke dalam akun yang sesuai.
7. Menjaga produk dan kas sampai pertukaran selesai dilakukan.

Sistem penjualan, fungsi siklus pendapatan umumnya meliputi pencarian pesanan dari pelanggan, pemeriksaan kredit pelanggan, pemasukan dan pemrosesan pesanan penjualan, perakitan barang untuk dikirimkan, pengiriman barang, penagihan terhadap pelanggan, penerimaan dan penyimpanan uang tunai yang dibayar oleh pelanggan, menyelenggarakan catatan piutang, pembukuan transaksi ke buku besar umum, dan penyiapan laporan keuangan serta keluaran-keluaran lain yang diperlukan. Sedangkan dalam sistem penerimaan kas, fungsi penyelenggaraan catatan piutang tidak diperlukan.

Pengukuran Pendapatan

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan dalam hal ini adalah penjualan jasa maka dapat

diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Dahlan (2007) mengemukakan pendapatan diukur dengan nilai wajar yang dapat diterima, jumlah pendapatan biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli yang diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan.

Bila barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat nilai yang sama maka pertukaran tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Dan bila barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa yang tidak serupa pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.

Pengakuan Pendapatan

Menurut Dahlan (2007), secara umum ada dua kriteria pengakuan pendapatan yaitu:

1. Pendapatan baru dapat diakui bilamana jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi atau cukup pasti akan segera terealisasi. Pendapatan dapat dikatakan telah terealisasi bilamana telah terjadi transaksi pertukaran produk atau jasa hasil kegiatan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas.
2. Pendapatan baru dapat diakui bilamana pendapatan tersebut sudah terhimpun atau terbentuk (earned). Pendapatan dapat dikatakan telah terhimpun bilamana kegiatan menghasilkan pendapatan tersebut telah berjalan dan secara substansial telah selesai sehingga suatu unit usaha berhak untuk menguasai manfaat yang terkandung dalam pendapatan.

Kedua kriteria di atas harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan walaupun bobot pentingnya untuk suatu keadaan tertentu dapat berbeda. Kriteria pengakuan pendapatan yang lebih teknis dikemukakan bahwa pendapatan dapat diakui kalau memenuhi persyaratan: (1) keterukuran nilai asset, (2) terjadinya transaksi, (3) proses penghimpunan secara substansial telah selesai

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan disini adalah penelitian studi kasus, dimana dalam pengumpulan, pengambilan dan menganalisis data dilaksanakan dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian dengan maksud agar data yang diperoleh dan keterangan yang lengkap sesuai dengan masalah yang dihadapi. Waktu penelitian diambil pada periode bulan Juli-Agustus 2024

Untuk mendapatkan data yang relevan peneliti menggunakan teknik penelitian lapangan artinya yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam obyek penelitian (Sugiyono, 2015)

Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus, sehingga metode analitis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu merupakan suatu metode analisis yang menggunakan informasi yang berupa data kualitatif atau data yang diukur secara tidak langsung (Sugiyono, 2015). Adapun langkah-langkah evaluasi terhadap sistem informasi akuntansi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Pada Siklus Pendapatan Dari Aktivitas Kredit di BPR SHM Malang
2. Evaluasi Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Pada Siklus Pendapatan Dari Aktivitas Kredit di BPR SHM Malang

3. Menyusun Suatu Kesimpulan Hasil Evaluasi siklus pendapatan dari aktivitas kredit di BPR SHM Malang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Pada Siklus Pendapatan Dari Aktivitas Kredit di PT BPR SHM

Adapun sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan aktivitas kredit di PT BPR SHM adalah sebagai berikut:

Prosedur Pemberian Kredit.

- Bagian *Customer Service* memperoleh pengajuan kredit dari nasabah dan membuat formulir pengajuan kredit rangkap 2 (dua) yang sebelumnya ditanda tangani oleh bagian administrasi, setelah itu lembar pertama diserahkan kepada bagian kredit dan lembar kedua diserahkan ke bagian administrasi. Pada proses ini juga ditentukan jenis atau model pinjaman.

- Atas dasar surat pesanan maka bagian administrasi menyiapkan sejumlah dana sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh nasabah.

- Bagian kredit membuat formulir pengajuan kredit barang rangkap 3 (tiga), yang kemudian diberikan bersama barangnya ke nasabah. Setelah formulir pengajua kredit ditandatangani oleh nasabah maka lembar pertama diserahkan ke bagian administrasi, lembar kedua diserahkan ke bagian keuangan, sedangkan lembar ketiga diserahkan ke nasabah.

- Berdasarkan pengajuan kredit lembar pertama, bagian administrasi membuat formulir rangkap tiga yang mana lembar pertama disimpan di bagian administrasi untuk dibukukan, lembar kedua diserahkan ke bagian keuangan dan lembar ketiga diserahkan ke nasabah.

- Bila saat penagihan, bagian keuangan mengirimkan surat tagihan kepada nasabah. Nasabah langsung membayar kepada kasir, kasir menerima uang tersebut dan membuat kwitansi, menandatangani dan mencap lunas.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem dan prosedur pemberian kredit pada PT BPR SHM, maka dapat diketahui unsur pengendalian intern yang terdapat di perusahaan yang secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Stuktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Dalam perusahaan jasa perkreditan kegiatan pokoknya adalah memberikan sejumlah kredit kepada nasabah (Hall, 2014). Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut maka dibentuklah bagian kredit, departemen administrasi, dan departemen keuangan dan umum. Departemen-departemen ini kemudian dibagi-bagi lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Dalam aktivitas pemberian kredit pada PT BPR SHM telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Fungsi bagian kredit terpisah dari bagian akuntansi. Dalam melakukan pencacatan tersebut bagian ini terpisah dengan bagian operasional perusahaan termasuk pada bagian penjualan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan atau menjamin bahwa tidak akan terjadi suatu kecurangan yang dapat dilakukan oleh bagian yang terkait dalam proses operasional atau pemberian kredit kepada nasabah. Pada sisi yang lain dengan adanya pemisahan tersebut maka dapat menghindari resiko terjadinya penyelewengan yang dapat terjadi yaitu dengan adanya penyimpangan dalam pemberian kredit sehingga nasabah yang tidak memiliki kelayakan dapat diterima.

b. Tidak terdapat transaksi yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi saja. Dalam proses pemberian kredit selalu melibatkan bagian-bagian yang terkait secara langsung dalam proses kredit dan merupakan bagian yang bertanggung jawab atas kelancaran proses tersebut. Dalam hal tersebut bagian ini bertanggungjawab secara langsung dalam proses pemberian kredit. Dengan adanya kondisi tersebut maka kredit dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pada satu bagian saja melainkan melibatkan keseluruhan bagian sehingga menghindari terjadi kecurangan yang dapat dilakukan oleh satu bagian.

2. Evaluasi Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

Dalam setiap melakukan transaksi dalam suatu organisasi sistem otorisasi dilakukan oleh bagian yang memiliki wewenang untuk melakukan persetujuan terjadinya transaksi tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam suatu organisasi harus dibuat suatu bagian yang mengatur atas terjadinya setiap transaksi. Dalam pelaksanaannya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada PT BPR SHM telah menunjukkan kurangnya pembagian tugas dan wewenang yang memadai yang mengakibatkan kurang adanya *internal check* di dalam unit organisasi dan menyebabkan data akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya atas kebenarannya.

3. Evaluasi Praktik yang sehat

Dalam pembagian tugas dan tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak dapat berjalan tanpa diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang telah ditempuh oleh PT BPR SHM dalam menciptakan praktik yang sehat tersebut yaitu meliputi:

- a. Bukti transaksi penjualan bernomor urut cetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemakai.
- b. Laporan penerimaan pelaporan penjualan produk bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan.
- c. Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan dan membandingkannya dengan tembusan surat pengajuan kredit yang telah ada.
- d. Terdapat pengecekan kembali kredit yang akan diberikan kepada nasabah.

Secara keseluruhan dapat membuktikan bahwa telah melakukan praktik yang sehat dalam melakukan aktivitas pemberian kredit di perusahaan.

4. Evaluasi Karyawan Yang Kompeten dan Jujur

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga diharapkan dapat mendapatkan jaminan bahwa karyawan yang dipekerjakan benar-benar memiliki kompetensi yang tinggi dan jujur serta bertanggungjawab atas pekerjaannya maka pihak manajemen melakukan atau melaksanakan program pendidikan dan pelatihan khususnya dalam bidang kredit dalam rangka meningkatkan kemampuan karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya dalam hal ini melakukan evaluasi atas aktivitas penjualan yang akan dilakukan, sehingga perusahaan memiliki karyawan yang berkompenten dan jujur dalam melakukan aktivitas di perusahaan.

Melakukan Evaluasi siklus pendapatan dari aktivitas kredit di PT BPR SHM

Semakin besar perusahaan, maka semakin sulit bagi pimpinan untuk mengadakan pengawasan atas aktivitas yang ada. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat menjamin adanya pengendalian intern. Aktivitas penjualan merupakan aktivitas yang penting yang berperan dalam penciptaan pendapatan perusahaan (Hall, 2014). Sehingga memerlukan pengawasan dan pengendalian yang semakin ketat. Untuk menjamin adanya pengendalian intern dalam aktivitas

pemberian kredit, maka perlulah dilibatkan bagian-bagian yang memungkinkan terjadinya pemisahan fungsi. Terutama perlu dipisahkan antara fungsi penyimpanan, pencatatan, operasional dan fungsi pengawasan. Sistem pengawasan intern dalam sistem penjualan yang dapat dilakukan dalam suatu perusahaan meliputi sistem pengendalian pemberian kredit.

Dalam aktivitas atau kegiatan penjualan produk dapat diketahui bahwa secara umum PT BPR SHM telah melaksanakan sistem dan prosedur pengendalian kredit dengan baik, namun demikian masih terdapat kelemahan yang terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai *internal chek* atas aktivitas yang dilakukan.

Prinsip pengendalian intern dalam penjualan pada dasarnya pengendalian berarti mengadakan tindak lanjut yang segera terhadap solusi yang tidak memuaskan, sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih besar (Hall, 2014). Dalam perusahaan kecil, pemilik atau manajer dapat melakukan pengendalian yang segera terhadap penjualan dengan cara meneliti order-order yang diterima dan lain-lain. Akan tetapi dalam perusahaan besar, kontak perorangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan yang menunjukkan kondisi dan tendensi pada masa sekarang dan juga prestasi pelaksanaan yang sedang berjalan pada saat sekarang. Adapun pengendalian kegiatan pemberian kredit yang telah dilakukan pada PT BPR SHM dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Semua transaksi penjualan benar-benar telah dicatat. Bagian kredit menulis besarnya kredit di hadapan langganan dengan menggunakan formulir pengajuan kredit yang telah diberi nomor urut yang dicetak. Tiap hari bagian kredit memeriksa bahwa nomor urut pengajuan kredit itu tidak putus, untuk menjamin bahwa semua pengajuan kredit telah dibuat bagian pengajuan kredit.
- b. Bagian kredit yang telah diisi oleh penjual diverifikasikan kepada nasabah, dengan demikian tiap kesalahan di dalamnya dapat segera diketahui oleh nasabah dan dapat segera diperbaiki.
- c. Besarnya kredit yang diajukan dengan kredit telah disetujui oleh bagian kredit.
- d. Penetapan sejumlah kredit yang dijual telah diverifikasi. Bagian kredit menulis dalam formulir kredit. Bagian administrasi melakukan evaluasi atas sejumlah kredit yang diajukan.
- e. Semua transaksi kredit dicatat dalam buku administrasi kredit.

Menyusun Suatu Kesimpulan Hasil Evaluasi siklus pendapatan dari aktivitas kredit di PT BPR SHM

Hasil evaluasi atas sistem dan prosedur pemberian kredit pada PT BPR SHM dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembagian tugas dalam aktivitas pemberian kredit pada PT BPR SHM telah dilakukan secara tepat sehingga aktivitas atau kegiatan pemberian kredit dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem otorisasi dan pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing bagian. namun demikian terdapat kelemahan yang harus segera dilakukan antisipasi yaitu masih kurangnya pembagian tugas dan wewenang yang memadai yang mengakibatkan kurang adanya *internal check* atas aktivitas yang dilakukan.
- c. Mengenai pembagian tugas dan tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang telah diterapkan telah mampu untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- d. Selama ini dalam aktivitas pemberian kredit pada PT BPR SHM telah didukung oleh karyawan yang dipekerjakan benar-benar memiliki kompetensi yang tinggi dan jujur serta bertanggungjawab atas pekerjaannya masing-masing.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan di PT. BPR SMH Malang, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis struktur organisasi PT. BPR SMH Malang dapat diketahui bahwa kegiatan pemberian kredit, pihak pengelola melakukan pembagian tugas secara tepat sehingga aktivitas atau siklus pendapatan telah secara tepat dilakukan sesuai dengan prosedur dan wewenang yang terdapat dalam pembagian tugas masing-masing pelaksana. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fungsi bagian kredit terpisah dari bagian akuntansi.
2. Hasil analisis sistem otorisasi dan pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing bagian. Kondisi tersebut dibuktikan dengan adanya bukti transaksi kredit bernomor urut cetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemakai, laporan penerimaan pelaporan kredit bernomor urut tercetak dan terdapat pengecekan kredit yang akan diberikan oleh PT BPR SHM.
3. Analisis mengenai pembagian tugas dan tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang telah diterapkan PT BPR SHM mampu untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. PT BPR SHM dalam menjalankan aktivitas operasional didukung oleh karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi dan jujur serta bertanggungjawab atas pekerjaannya sehingga segala bentuk sistem dan prosedur terkait dengan siklus pendapatan dapat dilaksanakan dengan baik.

REFERENCES

- Ahmad, Supriadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Kudus, Kudus, 2010, hlm. 64.
- Badriwan, Zaki. 2002. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi 5 Yogyakarta: Penerbit BPPE.
- Burhanuddin S, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 179.
- Dahlan. 2007. *Pendapatan*. [http://Dahlan's blog/2007/wordpress.com](http://Dahlan's%20blog/2007/wordpress.com).dikutip tahun 2024
- Hall, James A, 2014. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta, 2009. Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Cetakan III*, BPFE,Yogyakarta.
- PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 23 Tahun 2010 tentang Pendapatan. Ikatan Akuntani Indonesia
- Romney dan Steinbart. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems* (Edisi 14), Pearson.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Warkum, Sumitro, 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Widjajanto, Nugroho. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Wilkinson *et al* (2004). *Sistem akuntansi dan informasi*. Edisi ketiga jilid satu, jakarta binarupa aksara.